

Kendala Penyaluran Rumah Nelayan di Kampung Padang Rubiah Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan

Mela Wiwinda¹ Sri Rahayu² Ikhsan Muharma Putra³

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas PGRI
Sumatera Barat, Kota Padang, Indonesia^{1,2,3}

Email: melawiwinda15@gmail.com¹

Abstrak

Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara daratan dan lautan. Wilayah pesisir yang berkembang menjadi kawasan pemukiman adalah salah satu hal yang sangat kompleks, dimana selain aspek sosial, ekonomi, aspek-aspek budaya dan politik masyarakat juga akan ikut terlibat. Pemukiman yang letaknya tepat berada di bibir pantai ini adalah kampung yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Pemukiman nelayan adalah perkampungan yang mendiami daerah kepulauan, sepanjang pesisir termasuk danau dan sepanjang aliran sungai. Penduduk yang tinggal di kampung nelayan memiliki karakteristik berupa masyarakat tradisional dengan kondisi sosial ekonomi dan latar belakang pendidikan yang relatif terbatas. Kondisi sosial masyarakat kampung nelayan yang seperti ini membuat mereka sulit untuk mendapatkan kebutuhan bermukim yang memadai. Bahkan masyarakat kampung nelayan cenderung menjadi subyek yang menanggung permasalahan yang terdapat di lingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini terjadi di karenakan beberapa faktor, yaitu rendahnya pengetahuan dan lemahnya ekonomi sehingga aktivitas mereka juga sering menyebabkan tekanan terhadap lingkungan kampung nelayan yang berlanjut pada kerusakan pada ekosistem yang ada disana. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan maupun non makanan). Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah jumlah pengeluaran yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan makanan setara dengan 2100 kalori per orang per hari dan kebutuhan nonmakanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang berkembang. Dilihat dari bulan September tahun 2019 negara indonesia memiliki persentase penduduk miskin sebesar 9,22 %, menurun 0,19% terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44% terhadap September 2018. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada September 2019 sebesar 24,79 juta orang, menurun 0,36 juta orang terhadap Maret 2019 dan menurun 0,88 juta orang terhadap September 2019.

Kata Kunci: Kendala, Rumah, Nelayan

Abstract

The coastal area is an area where land and sea meet. The coastal area that develops into a residential area is one of the most complex things, where in addition to social, economic, cultural and political aspects, the community will also be involved. This settlement, which is located right on the beach, is a village where the majority of the population makes a living as fishermen. Fishermen's settlements are villages that inhabit island areas, along the coast including lakes and along rivers. People who live in fishing villages have the characteristics of a traditional society with socio-economic conditions and relatively limited educational background. The social conditions of the fishing village community like this make it difficult for them to get adequate housing needs. Even the fishing village community tends to be the subject who bears the problems in the environment where they live. This happens due to several factors, namely low knowledge and weak economy so that their activities also often cause pressure on the fishing village environment which continues to damage the ecosystem there. According to the Central Statistics Agency (BPS) poverty is an individual's inability to meet the minimum basic needs for a decent life (both food and non-food items). The poverty line set by BPS is the amount of expenditure needed by each individual to be able to meet food needs equivalent to 2100 calories per person per day and non-food

needs consisting of housing, clothing, health, education, transportation, and various other goods and services. Indonesia is one of the developing countries. Judging from September 2019 the country of Indonesia had a percentage of poor people of 9.22%, decreased by 0.19% against March 2019 and decreased by 0.44% against September 2018. While the number of poor people in September 2019 was 24.79 million people, decreased by 0.36 million people against March 2019 and decreased by 0.88 million people against September 2019.

Keywords: Fisherman, Settlement, Majority



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara daratan dan lautan. Wilayah pesisir yang berkembang menjadi kawasan pemukiman adalah salah satu hal yang sangat kompleks, dimana selain aspek sosial, ekonomi, aspek-aspek budaya dan politik masyarakat juga akan ikut terlibat. Pemukiman yang letaknya tepat berada di bibir pantai ini adalah kampung yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Pemukiman nelayan adalah perkampungan yang mendiami daerah kepulauan, sepanjang pesisir termasuk danau dan sepanjang aliran sungai (Sonya & nany 2012).

Penduduk yang tinggal di kampung nelayan memiliki karakteristik berupa masyarakat tradisional dengan kondisi sosial ekonomi dan latar belakang pendidikan yang relatif terbatas. Kondisi sosial masyarakat kampung nelayan yang seperti ini membuat mereka sulit untuk mendapatkan kebutuhan bermukim yang memadai. Bahkan masyarakat kampung nelayan cenderung menjadi subyek yang menanggung permasalahan yang terdapat di lingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini terjadi di karenakan beberapa faktor, yaitu rendahnya pengetahuan dan lemahnya ekonomi sehingga aktivitas mereka juga sering menyebabkan tekanan terhadap lingkungan kampung nelayan yang berlanjut pada kerusakan pada ekosistem yang ada disana (Sonya & Nany 2012).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan maupun non makanan). Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah jumlah pengeluaran yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan makanan setara dengan 2100 kalori per orang per hari dan kebutuhan nonmakanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang berkembang. Dilihat dari bulan September tahun 2019 negara indonesia memiliki persentase penduduk miskin sebesar 9,22 %, menurun 0,19% terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44% terhadap September 2018. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada September 2019 sebesar 24,79 juta orang, menurun 0,36 juta orang terhadap Maret 2019 dan menurun 0,88 juta orang terhadap September 2019.

Salah satu tugas pemerintah adalah mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Hal itu meliputi dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan yang menjadi kebutuhan primer. Pembangunan perumahan tersebut disediakan untuk perumahan bagi nelayan yang kurang mampu. Berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat No.20/PRT/M/2017 Pasal 9 Ayat 1 tentang penyediaan rumah khusus yang berbunyi: bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar setiap orang sebagai salah satu upaya membangun manusia indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri dan produktif. Dan kriteria masyarakat penerima bantuan rumah khusus tersebut adalah:

1. Masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan pesisir pantai dan bermata pencaharian sebagai nelayan.
2. Masyarakat sosial meliputi masyarakat lanjut usia, miskin, penyandang disabilitas, yatim piatu, atau anak terlantar yang secara sosial memerlukan perhatian dan bantuan.
3. Pekerja industri merupakan masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau pekerja industri yang berada di kawasan industri.
4. Masyarakat korban bencana, merupakan masyarakat yang terkena dampak langsung dari bencana skala atau berdampak nasional. Dimana apabila perumahan tersebut berhasil di manfaatkan dengan baik, maka itu akan memperbaiki kehidupan para nelayan yang ada di nagari kita ini. Dan juga akan mengangkat perekonomian masyarakat nelayan kearah yang lebih baik lagi.

Salah satu kelompok sasaran yang menerima program ini berdasarkan peraturan menteri tersebut adalah kelompok nelayan yang bertempat tinggal dikawasan pesisir pantai dan bermata pencaharian sebagai nelayan. Salah satu alasan nelayan sebagai kelompok sasaran dari program ini adalah karena kebanyakan dari nelayan di Indonesia merupakan nelayan tradisional yang menangkap ikan dengan skala kecil menggunakan alat tangkap tradisional yang seadanya, sehingga hal tersebut tak jarang mengakibatkan ongkos untuk menangkap ikan lebih besar dari hasil yang didapatkan dari menangkap ikan itu sendiri.

Bantuan rumah layak huni nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan dibangun sejak tahun 2017 oleh Kementerian PUPR. Bantuan ini berasal dari pemerintah pusat melalui dirjen perumahan pada kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR). Dana dari pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin dan nelayan bersumber dari APBN. Program bantuan rumah layak huni ini juga di bantu oleh dinas perumahan, permukiman dan pertahanan (Perkimtan). Dan program ini di perkuat berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Dan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni, PP No.88 Tahun 2014 tentang pembinaan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (moleong, 2010:6). Penelitian kualitatif ini lebih utama digunakan pada masalah kemasyarakatan yang secara mendalam dengan maksud untuk memahami sifat dan maknanya bagi perseorangan yang terlibat di dalamnya. Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang-orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, dan berusaha memahami bahasa dan tafsiran tentang dunia sekitarnya, untuk itu penelitian harus kelapangan.

Penelitian ini bertipekan deskriptif, yang selalu berupaya untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena tertentu. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi atau gejala yang ada yaitu keadaan menurut

apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Maka dari itu dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertipekan deskriptif karena dalam penelitian ini penulis ingin melihat gambaran bagaimana kendala penyaluran rumah khusus nelayan di kampung Padang Rubiah Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan (Afrizal, 2014 :13).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembangunan rumah nelayan ini diadakan di kampung padang rubiah nagari kambang barat. Rumah nelayan ini dibangun diatas tanah milik nagari, yang mana sebelum pembangunan rumah ini di bangun tanah milik nagari ini sudah dilaksanakan dulu melalui pembebasan lahan. Setelah semuanya sudah selesai, barulah pembangunan rumah nelayan di bangun daerah padang rubiah tersebut. Pembangunan rumah nelayan ini dikerjakan oleh pihak kontraktor. Setelah rumah ini dibangun barulah pihak kontraktor menyerahkan kepada pihak kepala dinas yang melaksanakan program rumah nelayan tersebut. Bangunan rumah nelayan ini di lengkapi dengan satu kamar tidur, ruang tamu, wc.

Pembangunan rumah nelayan ini merupakan program pemerintah yang di buat untuk masyarakat nelayan yang tidak memiliki rumah yang layak untuk dihuni dan juga masyarakat nelayan yang berpenghasilan rendah. Dan dengan adanya bantuan rumah nelayan ini akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dalam bentuk rumah yang layak. Karena masih banyaknya masyarakat nelayan Nagari Kambang Barat ini yang tidak meliki rumah yang layak untuk dihuni. Fasilitas yang disediakan dalam bangunan rumah ini sudah termasuk lengkap seperti:

1. Bangunan rumah. Bangunan rumah ini sudah disediakan dengan lengkap yaitu memiliki satu tempat ruangan tidur, ruang tamu, WC dan sedikit tempat memasak. Sehingga nyaman untuk dihuni oleh para nelayan yang akan menempatnya.
2. Penyediaan tempat drainase. Penyediaan tempat drainase ini cukup bermanfaat untuk mengalirkan air jika ketika musim hujan. Jadi daerah sekitar area pekarangan rumah tidak tergenang oleh air.
3. Penyediaan jalan untuk transportasi. Penyediaan jalan untuk transportasi juga disediakan berbentuk jalan beton agar memudahkan untuk di lalui kendaraan bermotor dan juga pejalan kaki.
4. Penyediaan listrik. Penyediaan listrik juga salah satu akses yang paling penting dalam suatu bangunan. Bangunan listrik yang disediakan setiap bangunan rumah. Listrik yang digunakan disini adalah listrik berupa token. Pendataan calon yang akan menjadi penerima bantuan rumah nelayan ini dilakukan dengan mengumpulkan data para nelayan yang ada di Nagari kambang Barat, dengan melampirkan kartu Keluarga dan kartu tanda nelayan. Pendataan ini dilakukan oleh pihak Perumahan yang bekerja sama dengan pihak Kantor Perikanan, Kantor Camat dan Kantor Wali Nagari Kambang Barat. Setelah mengumpulkan data para nelayan yang ada di Nagari Kambang Barat pihak perumahan akan melakukan penyeleksian atau validasi data untuk penerima bantuan rumah nelayan

KESIMPULAN

Pelaksanaan pembangunan rumah nelayan ini diadakan di kampung padang rubiah nagari kambang barat. Rumah nelayan ini dibangun diatas tanah milik nagari, yang mana sebelum pembangunan rumah ini di bangun tanah milik nagari ini sudah dilaksanakan dulu melalui pembebasan lahan. Setelah semuanya sudah selesai, barulah pembangunan rumah nelayan di bangun daerah padang rubiah tersebut. Pembangunan rumah nelayan ini dikerjakan oleh pihak kontraktor. Setelah rumah ini dibangun barulah pihak kontraktor

menyerahkan kepada pihak kepala dinas yang melaksanakan program rumah nelayan tersebut. Bangunan rumah nelayan ini dilengkapi dengan satu kamar tidur, ruang tamu, wc.

Pembangunan rumah nelayan ini merupakan program pemerintah yang di buat untuk masyarakat nelayan yang tidak memiliki rumah yang layak untuk dihuni dan juga masyarakat nelayan yang berpenghasilan rendah. Dan dengan adanya bantuan rumah nelayan ini akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dalam bentuk rumah yang layak. Karena masih banyaknya masyarakat nelayan Nagari Kambang Barat ini yang tidak meliki rumah yang layak untuk dihuni.

Fasilitas yang disediakan dalam bangunan rumah ini sudah termasuk lengkap seperti: Bangunan rumah, Bangunan rumah ini sudah disediakan dengan lengkap yaitu memiliki satu tempat ruangan tidur, ruang tamu, WC dan sedikit tempat memasak. Sehingga nyaman untuk dihuni oleh para nelayan yang akan menempatnya. Penyediaan tempat drainase, Penyediaan tempat drainase ini cukup bermanfaat untuk mengalirkan air jika ketika musim hujan. Jadi daerah sekitar area pekarangan rumah tidak tergenang oleh air.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Wali Press.
- Arikunto, 2010. Petode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta
- Fauziah Amalia, 2020. Implementasi Program Rumah Khusus Nelayan Di Nagari Koto Nan Tigo IV Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Skripsi.Padang:Program Sarjana Universitas Andalas.
- Moleong J, Lexy. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 20 Tahun 2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus.
- Raharjo, 1999. Pengantar sosiologi pedesaan dan pertanian. Gajah Mada University Press.
- Ritzer, 2011. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana.
- Sonya, Nany.2012. Potensi Kampung Nelayan Sebagai Modal Pemukiman Berkelanjutan Di Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas. Teknik PWK. 1(1) 11-19.
- Sugiyono, 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Alfabeta.
- Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan pemukiman.
- Wilis, Asriadi.2018. kriteria dasar infrastruktur pemukiman pada daerah. contoh kasus daerah Nelayan Koto Sorong. Program studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sorong.